BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Keadaan Georafis Kota Bandung

Kota Bandung adalah salah satu kota yang berada diwilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, terletak pada 107 Bujur Timur dan 6,55 Lintang Selatan, dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota Bandung menjadi strategis, baik bagi komunikasi, perekonomian maupun keamanan dimana Kota Bandung terletak pada titik pertemuan poros jalan raya Barat Timur yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang Dan Pangalengan).

Kota Bandung terletak pada ketinggian 368 meter diatas permukaan air laut, titik tertinggi daerah utara dengn ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan air laut. Kota Bandung merupakan salah kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu,Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebalah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu.

Daerah Bandung merupakan daerah subur dengn dialiri oleh Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai jalan kereta api relatif keadaan datar, sedangkan wilayah Bandung Utara berbukit-

bukit sehingga merupakan dataran. Daerah pegunungan Kota Bandung merupakan lapisan tanah atau *alluvial* dan endapan sumur dan danau didaerah pegunungan yang subur.

3.1.2 Fungsi Kota Bandung

Kota Bandung mempunyai fungsi yang terdiri dari,sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan, tempat Ibukota Provinsi Jawa Barat, juga pernah merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, selain itujuga mengalami menjadi Ibukota Keresidenan Priangan. Ibukota Bandung banyak terdapat perkantoran pemerintah dan BKKN dari mulaitingkat provinsi dan tingkat nasional(pusat).
2. Kota pendidikan dan ilmu pengetahuan, tempat berdirinya sarana pendidikan yang sangat lengkap mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berskala nasional maupun internasional baik secara formal maupun informal, swasta maupun negeri. Sejalan dengan lengkapnya sarana pendidikan maka pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan banyak yang berlokasi di Kota Bandung.
3. Kota industri dan perdagangan, tempat berdirinya industri kecil sampai dengan industri besar yang mempunyai lingkup internasional seprrti industry pesawat terbang nusantara. Selainitu kota bandung memepunyai pusat perdagangan teerbesar di provinsi Jawa Barat.

4. Kota konferensi, tempat diselenggarakannya seminar, rapat kerja dan lainsebagainya sebagai baik tingkat daerah bahkan tingkat internasional seperti KKA (1955).
5. Kota pariwisata, tempat berliburnya wisatawan domistik dan asing memngingat banyaknya lokasi pariwisata baik di wilayah Kota Bandung itu sendiri mapun di wilayah sekitar Kota Bandung. Hal ini ditunjang oleh pemandangan yanga indah dan udara yang sejuk.

   (Data monografi Kota Bandung Tahun 2006)

Berdasarkan pada fungsi Kota Bandung di atas, maka dalam pencapaian fungsi tersebut Kota Bandung harus didukung oleh berbagai hal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keuangan yang memdai serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut baik.

3.2 Gambaran Umum PT. Pos (Persero) Kota Bandung

3.2.1 Sejarah Singkat PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Kantor Pos Bandung atau bisa disebut Kantor Pos Besar Bandung terletak di pusat kota, di tepi *Grote Postweg* (Jl. Asia Afrika) sebelah barat laut Alun-Alun Bandung. Kantor Pos Bandung yang awalanya berukuran kecil dibangun pada tahun 1863 di tepi *Grote Postweg* berdampingan dengan sebuah rumah sakit di sebelah barat dan *Oude Kerkhofweg* (Jl. Banceuy) disebelah timur. Tahun 1928 Gedung Kantor Pos dan bangunan bekas rumah sakit dibongkar untuk dibangun kantor pos yang lebih besar.

Kantor Pos dibangun berlantai dua dan pembangunan dilaksanakan pada tahun 1928-1931 dengan bentuk seperti sekarang ini. Gedung Kantor Pos Bandung telah dinyatakan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi. Dinas Pos dimulai tahun 1714 yaitu dimasa *Vareenigde Oost Compagnie* (VOC) berkuasa. Peraturan mengenai perposan pertama kali diberlakukan tanggal 18 Juni 1808. Layanan Pos masuk kewilayah priangan secara teratur mulai awal tahun 1809. Seiring dengan terbitnya prangko pertama Hindia Belanda tahun 1864, Dinas Pos dijadikan sebuah jawatan dalam pemerintahan.

PT. Pos (Persero) Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjukan untuk mempertinggi kelancaran hubungan dengan masyarakan. PT. Pos (Persero) Kota Bandung memiliki sejarah yang cukup panjang, namun dalam laporan ini penulis hanya menguraikan secara singkat tentang sejarah PT. Pos (Persero) Kota Bandung yang diuraikan sebagai berikut:

Gagasan memperlancar arus komunikasi dalam bentuk surat menyurat pada masa colonial Belanda semakin terwujud ketika Gubernur jendaral G. W. Baron Van Imhif mendirikan Kantor Pos pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746. Namun demikian peran Kantor Pos menjadi semakin penting dan berkembang setelah penemuan Telegrap dan Telepon, maka pada Tahun 1907 dibentuklah jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (Jawatan PTT).

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi Pemerintahan Militer Jepang. Pada tanggal 27 September 1945 dilakukan pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT (AMPTT) dari Pemerintahan Militer Jepang

yang kemungkinan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti Postel.

Saat Jawatan PTT dianggap telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Perusaha Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960, maka Jawatan PTT di ubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961. Agar didalam mengembangkan usahanya dapat diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas selanjutnya PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No.29 Tahun 1965 dan PP No. 30 Tahun 1965.

Status PN Pos dan Giro kemudian di ubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarka PP No 6 Tahun 1978, yang kemudian disempurnakan berdsarkan PP No. 24 tahun 1984, akhirnya untuk dapat menghadapi perkembngan dunia usaha yang semakin marak dan penuh dengan persaingan yang sangat ketat, maka diubahlah, maka diubahlah status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia ((Persero)) yang dilasanakan berdsarkan PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Febuari tahun 1995. Perubahan stus tersebut secara efektif mulai berlaku pada tanggal 20 Tahun 1995.

a. Perjalanan panjang telah mengantarkan profesionalisme pelayanan pos semakin tajam. Apabila ketika terjadinya perubahan status perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi (Persero)an Terbatas (PT) pada tanggal 20 Juni 1995, yang telah memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi PT. Pos (Persero) Kota Bandung

untuk mengeluti dunia bisnis secara dinamis. Kondisi tersebut memicu perusahaan ini untuk semakin mendekat diri dengan pelanggan dan melangkah lebih efisien. Didukung oleh 27.000 karyawan dan 34.687 titik pelayanan yang terbesar diseluruh pelosok Tanah Air. PT. Pos (Persero) Kota Bandung berhasil, menata dan memanfaatkan potensi serta jaringan pelayanannya yang tersebar di 11 Wilayah Usaha Pos yang yang terintegrasi secara Nasional, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Dengan potensi tersebut dan didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolog, PT. Pos (Persero) Kota Bandung selalu mengimbangakan

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Tugas dan PT. Pos (Persero) Kota Bandung adalah melaksanakan usaha dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun di luar wilayah Indonesia serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan terbatas.

Untuk melasanakan tugas pokok PT. Pos (Persero) Kota Bandung dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikit:

a. Usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account).

b. Usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retair, jasa keagenan dan jasa lain-lain yang menunjang yang menunjang penyelenggara usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Usaha pemenfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan.
d. Selain kegiatan usaha utama sebagai mana dimaksud perusahaan dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka usaha optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk properti.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok perusahaan, setiap tahapan proses pekerja yang dilakukan oleh unit oarganisasi wajib berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tunduk pada peraturan yang berlaku (Comliance).
b. Berdasarkan kaidah-kaidah mutu yang telah ditetapkan sehingga kinerjanya dapat diukur (Quality Assurance).
c. Berdasarkan pada penjiwaan dan kerangka berfikir atas sifat dan jenis pekerjaan yang sistematik.
d. Menjunjung asas Good Corporate Governance.

3.2.3 Visi dan Misi PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Salah satu kebutuhan hidup yang cukup penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang salinh

mengirim barang dari tempat yang jauh memebuat jasa ini menjadi menjadi sangat penting. Berdasarkan kenyataan tersebutbanyak bermunculan jasa pengiriman barang swasta, sedangkan jasa pengiriman pemmerintah dari dahulu sampai sekarang hanya satu, yaitu PT. Pos Indonesia (Persero).

Pada dasarnya keberadaan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan bagian intergral dari pembangunan nasional, yaitu mempercepat pembangunan melalui pembangunan jaringan komunikasi antar daerah.oleh karena itu penyelenggaraan Pos dijalankan oleh negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional (pertimbangan pembentukan UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos). Dalam melaksanakan pelayanan jasa melalui pos, khususnya kepada pelaksanaan pengiriman surat Pos dan paket Pos, pihak PT. Pos Indonesia (Persero)berkewajiban menerima tujuan tertentu dengan selamat.

PT. Pos Indonesia melayani komunikasi bagi semua penduduk diseluruh wilayah Nusantara dengan luas wilayah sekitar 5.000.000 km yang terdiri dari 17.508 pulau dengan luas daratan kurang lebih 2.000.000 km yang menjangkaukurang lebih 35.000 titik antar. Selain itu pelayananyang diberikan PT. Pos Indonesia (Persero) mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempercepat hubungan antar bangsa.

Visi PT. Pos (Persero) Kota Bandung

PT. Pos (Persero) Kota Bandung adalah penyedia jasa pos bernilai tinggi dengan daya saing global.

Misi PT. Pos (Persero) Kota Bandung

1. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung oleh teknologi tepat guna dan sumber daya manusia professional.
2. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, trnsaksi keuangan, dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.
3. Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing yang kuat, baik di pasar domestik maupun di pasar global.
4. Memberikan pelayanan untuk memanfaatkan umum yang menjangkau seluruh peloksok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa.

3.2.4 Struktur Organisasi dan uraian tugas PT. Pos (Persero) Kota Bandung

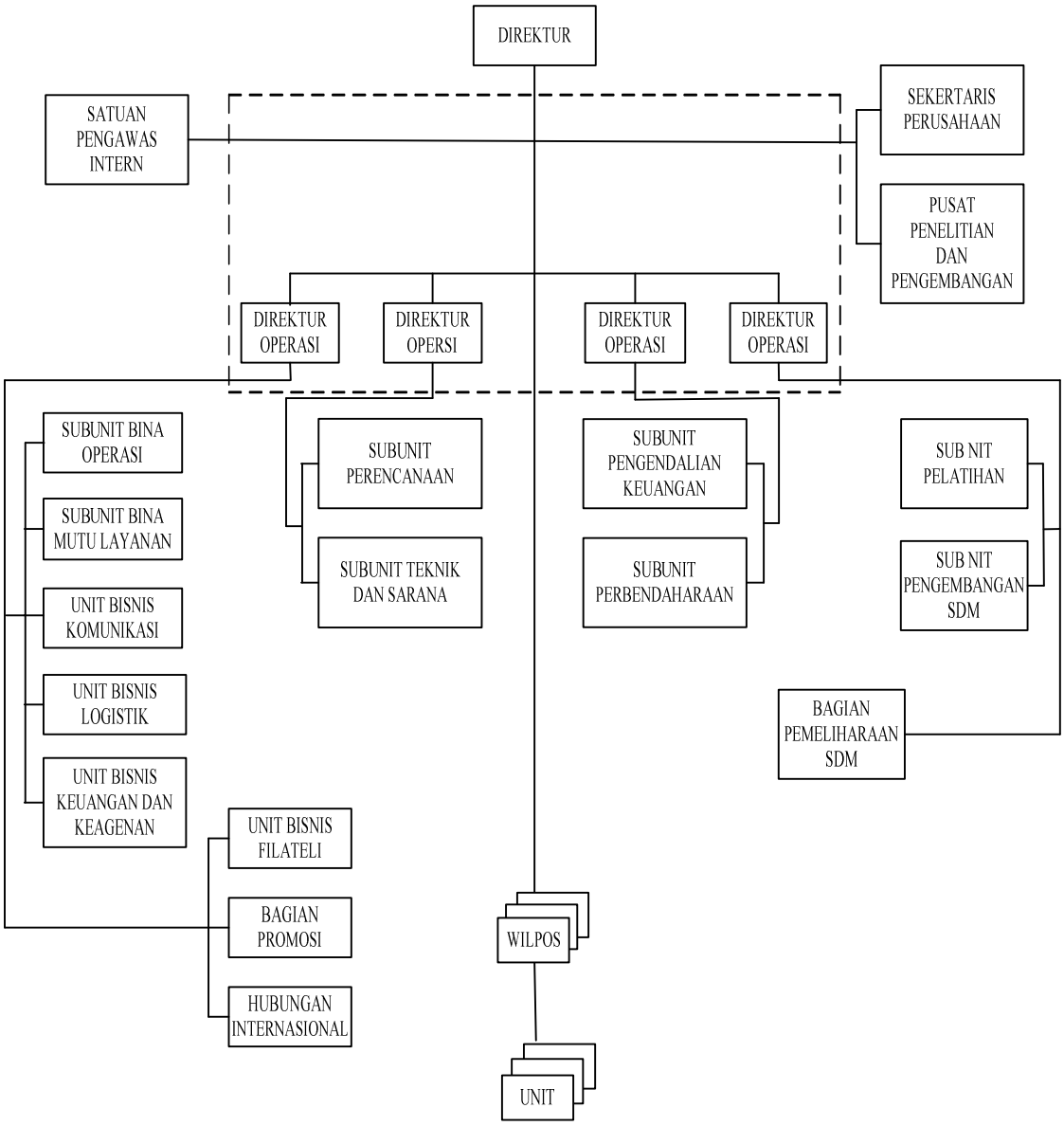
Struktur organisasi yang baik dan yang sesuai dalam suatu perusahaan dapat membantu dilaksanakannya operasi perusahaan sesuai dengan fungsinya, sebab didalam struktur organisasi dijelaskan secara tegas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang yang ada diperusahaan. Agar dapat meningkatkan pelayanan dan kelancaran dalam jasa telekomunikasi bagi masyarakat, maka ditetapkanlah suatu struktur organisasi.

Bentuk struktur organisasi yang dianut oleh PT. Pos Indonesia ((Persero)) adalah bentuk struktur organisasi garis dan staf (Line-Staff Organization). Struktur ini berusaha untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada struktur organisasi garis. Disini kesatuan perintah tetap diperintah, atasannya

memiliki bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah deri seorang atasan saja dan kepada atasan tersebut bahwa bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan kepada atasan tersebut bawahan harus bertanggung jawab atas pelasanaan pekerjaanya. Dalam hal ini, terdapat satu atau beberapa oarang staf. Tugas staf disini hanya memberi nasehat kepada pimpinan, tetapi tidak mempunyai hak untuk memeritah bawahan, karena secara formal yang berhak memerintah bwahan hanya pimpinan saja.

Bentuk struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) dapat diliahat pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)



Sumber PT. Pos (Persero) Indonesia

Berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. KD. 02/DIRUT/0104 dapat diuraikan susunan dan uraian tugas masing-masing bagian pada kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) adalah:

1. Direktur
    a. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil perusahaan dalam maupun diluar pengadilan dan melakukan segala tindak atau perbuatan, baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan, serta mengikat kinerja sama dengan pihak lain.
    b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas direktur, kepada satuan pengawasan intern, sekretaris perusahaan, kepala pusat, dan Kepala Wilayah Usaha Pos serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi.
2. Direktorap Operasi
    a. Pengendalian sistem dan mutu oprasional surat pos, wesel pos, dan giro pos, serta keagenan.
    b. Penunjang operasi pelayanan meliputi penyelenggaraan pengumpulan, lalu lintas pos dan antaran, mekanisasi dan pengolahan pos.
    c. Pembinaan pelayanan paket.
3. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana
    a. Pembinaan kegiatan pengembangan usaha surat pos, jasa keuangan, dan jasa keagenan.

b. Pembinaan kegiatan promosi serta penyusunan tarif dan harga pokok pembinaan pelanggan.
c. Pembinaan dan pengembangan usaha filateli.

4. Direktorat keuangan
    a. Penyusunan dan perencanaan anggaran perusahaan, evaluasi realisasi anggaran, pelaksanaan verifikasi serta pembuatan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan tahunan.
    b. Penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan dana, hutang atau piutang perusahaan, pembendaharaan dan kesekretariatan direktorat keuangan.

    Sub bagiannya adalah sebagai berikut:
    a. Bagian sekretariat direktorat keuangan
    b. Subdit pengendalian keuangan, membawahi: bagian Akuntansi, bagian anggaran dan investasi, bagian akuntansi biaya.
    c. Subdit pembendaharaan, membawahi: bagian pengelolaan kas dan bagian pengendalian penyertaan modal perusahaan.

5. Direktorat Sumber Daya Manusia
    a. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengembangan, pengaturan, dan penerbitan sumber daya manusia.
    b. Pembinaan dan pengelolaan peralatan, perangko, dan benda pos.
    c. Pembinaan dan pengendalian usaha properti dan transportasi.

Direktorat Sumber Daya Manusia, membawahi:

1. Sub Direktorat Pelatatiahan SDM

   Tugas: membina, mengelola, dan sistem manajemen, membina tata laksana,mengkoordinasi pengawasan melekat, membina pengusahaan usaha properti dan tranportasi.

   Sub direktorat pelatihan SDM, membawahi: bagian penyelenggaraan pelatiahan, bagian bina program, bagian umum pelatihan.

2. Sub direktorat pengembangan SDM

   Tugas: menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan rekrutmen, pengembangan dan pengadministrasian, serta melaksanakan pengembangan organisasi dan sistem manajemen sesuai dengan perubahan dan perkembangan strategi perusahaan.

   Sub Ditertorat pengembangan SDM, membawahi:

   a. Bagian perencanaan SDM

      a) Merancang dan mengembangkan sistem dan prosedur perencanaan rekrutmen dan pengembangan karir untuk pegawai perusahaan.
      b) Menetapkan calon peserta seleksi diklat yang berasal dari pegawai.
      c) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ataupun perguruan tinggi negeri atau suasta.

d) Mengimplementasikan program trasfer, promosi dan demosi pegawai dikantor pusat serta pegawai di Wilpos sepanjang diperlukan sesuai dengan IDP (I*ndividual Delopment program*).

b. Bagian pembinaan SDM

Merancang sistem penggajian bagi seluruh level pegawai termasuk tunjangan-tunjangan:

a) Merancanag dan mengembangkan sistem imbalan jasa penertiban bagi seluruh pegawai perusahaan.
b) Melaksanakan kegiatan administrasi bagi pegawai kantor pusat.
c) Megadakan pembayaran gaji dan tunjangan, serta Pph bagi pegawai kantor pusat.

c. Bagian administrasi SDM dan SIM SDM

Tugas: mengelola basis data SDM perusahaan dan memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh unit-unit terkait, serta melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian lainnya.

d. Bagian organisasi

Tugas: merancang struktur organisasi perusahaan, sistem manajemen, serta melakukan penyempurnaan dan atau pengembangan organisasi perusahaan.

e. Bagian pemeliharaan SDM

Tugas: merancang sistem pemberian dan pemeliharaan kesehatan, serta program-program kesejahtraan, serta merancang sistem dan prosedur pensiunan.

6. Satuan Pengawasan Intern
    a. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengendalian manajemen penigkatan keekonomian, efisienan, dan keefektifan.
    b. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian teerhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan serta kinerja perusahaan.
7. Sekertaris Perusahaan
    a. Penyelenggaraan kesekretariatan Direktur Utama, pengkoordinasian dan penyajian informasi perusahaan.
    b. Penelaah perundang-undangan, penanganan masalah hukum dan perikatan.
8. Pusat Penelitian dan Pengembangan
    a. Penyelenggara kegiatan penyusunan rencana jangka panjang dan jang pendek serta evaluasi realisasinya.
    b. Penyelenggaraan dan atau pengelolaan kegiatan peneliatian terapan baik dalam bidang operasional maupun *non-oprasional.*

3.2.5 Keadaan Aparatur PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Keberhasilan aktivitas bisnis sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari peran serta karyawan. Karyawan merupakan mesin penggerak seluruh aktivitas perusahaan, namun kinerja karyawan tidak selamanya optimal mesin tidak selanya bekerja dengan baik turunnya prestasi kerja karyawan menjadi masalah yang sangat *crucial* sebagai perusahaan. Penurunan prestasikerja karyawan tercermin dari kualitas pekerjaan yang rendah, pengetahuan dan kemampuan kerja yang kurang, kreatifitas kerja yang kurang, kreatifitas kerja yang rendah dan sikap kerja yang negatif. Semua hal ini terjadi tentunya bukan karna sebab. Banyak factor dihubungkan dengan prestasi kerja karyawan. Penempatan karyawan yang baik dinilai akan mampu menciptakan karyawan-karyawan yang berprestasi.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pos Kota Bandung (Persero) sehubungan dengan adanya pandagan masih rendahnya persentasi kerja karyawannya, salah satu faktor yang dinilai berhubungan dengan dalam penelitian ini penempatan karyawan, dengan adanya hubungan yang kuat dan positifantara penempatan karyawan denagan persentasi kerja karyawan pada PT. Pos Kota Bandung (Persero.

3.2.6 Aktivitas Usaha PT. Pos Kota Bandung (Persero)

PT. Pos (Persero) Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dibidang pelayanan jasa Pos dan Giro bagi

masyarakat baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia dengan mengeluarkan prinsip-prinsip (Persero) terbatas (PT). Pada pokoknya usaha-usaha yang dijalankan oleh PT pos adalah memberikan berbagai macam layanan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kinerja dan tugas PT. Pos (Persero) Kota Bandung yaitu:

1. Surat Pos

   Pelayanan standar pengiriman berita yang tersedian di semua kantor pos dengn tarif seragam, baik untuk perhubungan didalam maupun diluar negeri. Jenis surat pos meliputi: surat, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, majalah, sekogram (Braille) dan bungkusan.

2. Surat kilat

   Layanan untuk kiriman pos cepat didalam negeri (Express Mail) yang menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantarnya.

3. Surat kilat khusus

   Layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos didalam negeri dalam fasilitas jejak lacak, guna mengetahui status kiriman waktu tempuh antara 24 jam sampai dengan 48 jam.

4. Express Mail Service (EMS)

   Layanan cepat kiriman berita atau sebagai solusi cepat pengiriman pos internasional dengn fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman. Waktu tempuh antar satu sampai dengan tiga hari.

5. Ratron

Layanan surat elektronik merupakan hibrida antara surat secara fisik dengan kombinasi transmisi data melalui jaringan telekomunikasi. Hasil transfer data berupa kopi naskah asli akan diantarkan kepada alamat penerima dalam sampul tertutup dengan jaminan waktu tempuh maksimum 6 jam.

6. Ratron simpati

   Layanan surat elektronik untuk berbagai layanan simpati

7. Surat Bisnis Elektronik (SBE)

   Layanan hibrida antara transmisi data elektronik dengan antara fisik surat pos.

8. Wesel pos

   Layanan transfer uang sebagai solusi kiriman uang keseluruh indonesia tersedia berupa jenis pelayanan tambahan untuk wesel pos yaitu: wesel pos kilat, wesel pos kilat khusus, wesel pos elektronik (westron) wesel posberlangganan, wesel pos tebusan dan wesel pos luar negeri ke/dari beberapa negara.

9. Giro pos

   Layanan kenangan untuk menampung, penyimpanan dan pembayaran berbagai transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan bisnis de seluruh Indonesia.

10. Cek Pos Wisata (CPW)

    Layanan keuangn sebagai solusi dan perjalanan karena dapat diuangkan di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW dari Rp.

10.000,- sampai dengan Rp. 25.000,-. Beberapa hotel, lestoran travel biro dan tempat-tempat lainnya yang telah menerima CPW sebagai alat pembayaran.

11. Paket pos

    Layanan untuk mengirim barang yang dapat dilakukan di semua kantor pos, baik untuk perhubungan domistik maupun internasional.

12. Belanja Lewat Pos (BLP)

    PT. Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan mitra kerja menyediakan layanan BLP (Mail Order) sebagai solusi belanja jarak jauh berbagai produk. Manfaat bagi konsumen adalah mendapat produk-produk pilihan dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Deskripsi dan ilustrasi produk digelar dalam katalog/brosur yang diterbitkan secara berkala. BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

13. Pos plus

    Berbagai layanan dengan nilai tambah yang dikemas melalui sarana pelayanan pos plus sehingga dapat memberikan solusi untuk semua jenis kiriman pos.

14. Filateli

    Dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya khasanah hobi mengumpulkan perangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan yang bervariasi. Menyadari bahwa filateli adalah benda koleksi yang banyak diminati para

penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh suatu difisi agar lebih fleksibel dan akrab dalam melangkah bersama filatelis dan masyaraka.

15. Wasantara-Net (W-Net)

    Layanan pertukaran informasi melalui internet sebagai solusi komunikasi baik untuk dalam maupun luar negeri.

16. Pos serba ada (poserba)

    Poserba menyediakan semua kebutuhan dengan berhubungan dengan pos dan alat tulis menulis termasuk kartu ucapan dan benda filateli dalam kemasan khusus. Poserba berda dikantor pos dan tempat-tempat lainnya yang letaknya strategis.

17. Pos pemasaran keliling

    Pos pemasaran keliling memiliki kapasitas pelayanan pengantar pos selain mengantarkan kiriman pos juga ditambah dengan pelayanan kebutuhan pos lainnya seperti: penjualan benda pos dan materai, penerimaan kiriman pos dan lain-lain sehingga lebih mendekatkan layanan pos kepada masyarakat setiap hari dengan sepeda motor dan seragam khas serta dilengkapi dengan bunyi melodi yang menandai kehadiran pos antar keliling (posarling) yang siap untuk memberikan berbagai pelayanan pos.

18. Halo pos 161

    Halo pos 161 digunakan sebagi sarana untuk memberikan informasi layanan kepada seluruh pengguna pos. Fasilitas ini ditujukan agar pelayanan dapat menghemat waktu. Biaya dan upaya untuk memperoleh

informasi seluas-luasnyatentang pelayanan jasa pos. Pengguna fasilitas pos 161 ini hanya cukup memutar nomor telepon 161.

19. Layanan keagenan

    Pelayanan jasa keagenan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) untuk kepentingan pihak ketiga, yang meliputi: penabungan dan pembayaran untuk Bank Tabungan Negara, pemotongan pensiunan eks bank kreditur, pembayaran tabungan TASPEN dan ASABRI, serta penjualan benda materai untuk Dorektorat pajak.

20. Waralaba Pos

    Seiring dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas maka PT. Pos Indonesia memandang perlu untuk lebih meningkatkan peran swasta pada usaha person. Untuk itu telah diluncurkan *Francising* Waralaba Pos,hal ini dimaksudkan agar paracalon mitra atau investor dapat ikut serta dalam pengelolaan Kantor Pos denagn Waralaba Pos diharapkan ketersebaran outlet dan layanan pos dilakukan oleh pihak swata.

21. E-Mobile Post

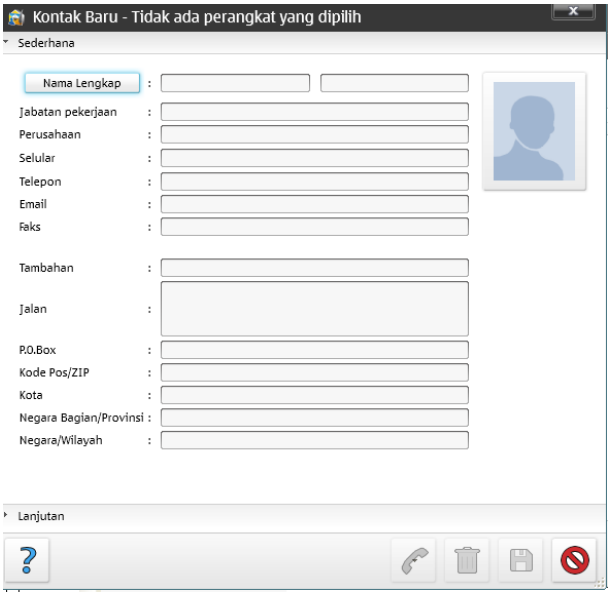
    Pelayanan pos dengan mobil yang dilengkapi dengan fasilitas komputer sebagai sarana transaksi seca *On-Line* yang memberikan layanan secara terpadu.

3.2.7 Maksud dan Tujuan Pembayaran Rekening Listrik Secara *On-line*

Pembayaran rekening listrik secara *On-line* merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh PT. Pos (Persero) Kota Bandung bekerja sama dengan PT.

PLN (Persero). Tujuan pembayaran rekening listrik secara *On-line* adalah mempermudah masyarakat untuk pembayaran listrik. Semakin berkembang teknologi informasi membuat terobosan baru dalam Pembayaran rekening listrik secara *On-line.* Dimana pembayaran listrik tidak hanya dilakukan di loket PT. PLN (Persero) tetapi dengan adanya terobosan baru pembayaran rekening listrik bisa dilakukan di PT. Pos (Persero) tampilan pembayaran rekening listrik secara *on-line* sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tampilan Data Pelanggan

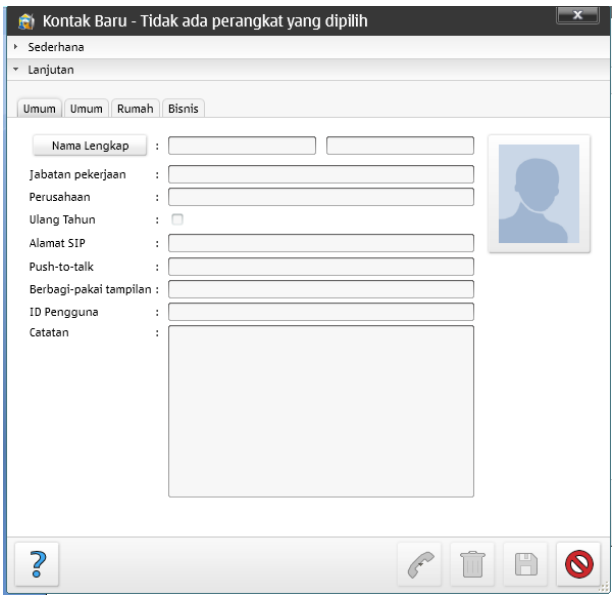


Sumber: PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Pada tampilan awal terdapat pengisisan data pelanggan dimana pada menu data pelanggan ini aparatur harus mengisi terlebih dahulu Nama Lengkap, Jabatan Pekerjaan, Perusahaan, Seluler, Telepon, Email, Faks, Tambahan, Jalan, P.o.box, Kode Pos/ZIP, Kota, Negara Bagian/Provinsi, Negara/Wilayah sebelum melakukan proses pengisian menu pelanggan. Setelah semua kolom terisi aparatur

PT. Pos (Persero) Kota Bandung menyimpan data tersebut dengan memindahkan kursor ke gambar Disket untuk menyimpan data pelanggan. Setelah itu aparatur PT. Pos (Persero) Kota Bandung melanjutkan ke menu:

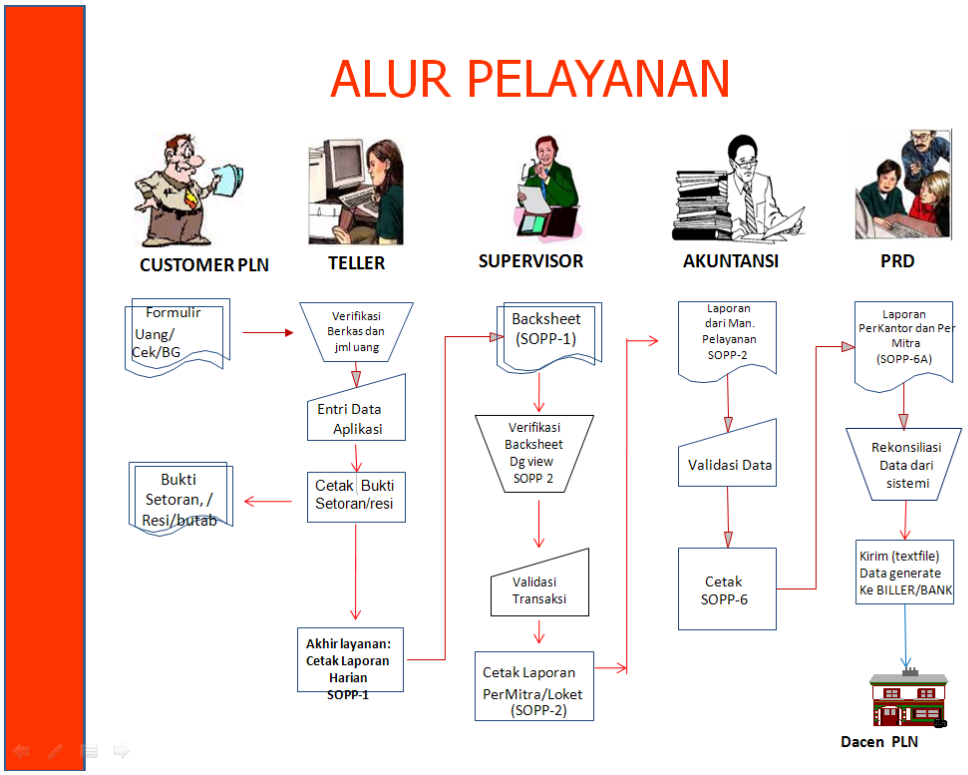
Gambar 3.3
Tampilan Data Pelanggan lanjutan



Sumber: PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Pada tampilan kedua menu data pelanggan lanjutan dimana pada menu data pelanggan lanjutan ini aparatur harus mengisi kolom untuk penyempurnaan data pada menu pelanggan lanjutan terlebih dahulu Nama Lengkap, Perusahaan, Ulang Tahun, Alamat SIP, Push-to-talk, Berbagi-Pakai-tampilan, ID Pengguna, catatan. Setelah melakukan pengisian data tersebut barulah masyarakat bisa melakukan Pembayaran Rekening Listrik Secara *On-line.* adapun alur pelayanan dalam pembayaran listrik bisa di lihat pada.

Gambar 3.4
ALUR PELAYANAN

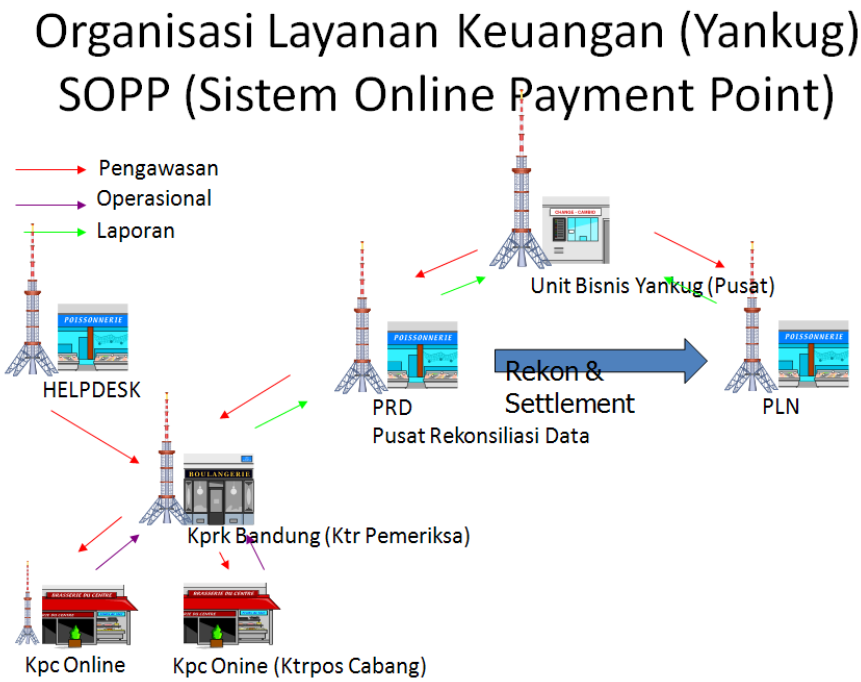


Sumber: PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Untuk Pembayaran Rekening Listrik untuk customer mengambil formulir dan menulis data, dan identitas untuk pembayaran rekening listrik, ambil antrian lalu masuk ke teller menyodorkan formulir ke teller dari teller menulis data yang Customer dikomputer dan Verifikasi berkas dan jumlah uang lalu antri data aplikasi dan mencetak bukti setoran/resi, setelah mencetak bukti setoran/resi ada bukti setoran/resi/buku tabungan dalam akhir layanan cetak laporan harian untuk menyetorkan ke bagian Supervisor, Backsheet, (SOPP-1) Sistem On-Line Payment Point tahap satu setelah (SOPP-1) Backsheet dengan View (SOPP-2)

lalu ke Validasi Transaksi, lalu kebagian cetak laporan PerMitra/Loket (SOPP-2) kebagian Akuntansi setelah bagaian Akuntansi masuk ke laporan dari Manajemen Pelayanan (SOPP-2) masuk lagi ke bagian Validasi Data lalu cetak ke untuk (SOPP-6) masuk lagi kebagian PRD Laporan Perkantor dan Permitra (SOPP-6A) lalu masuk lagi kebagian Rekomendasi Data dari Sistemi dan mengirimkan kebagian Texfile Data Generate ke Biller Bank dan sampailah ke Daken PLN atau ke PLN di wilayah tersebut.

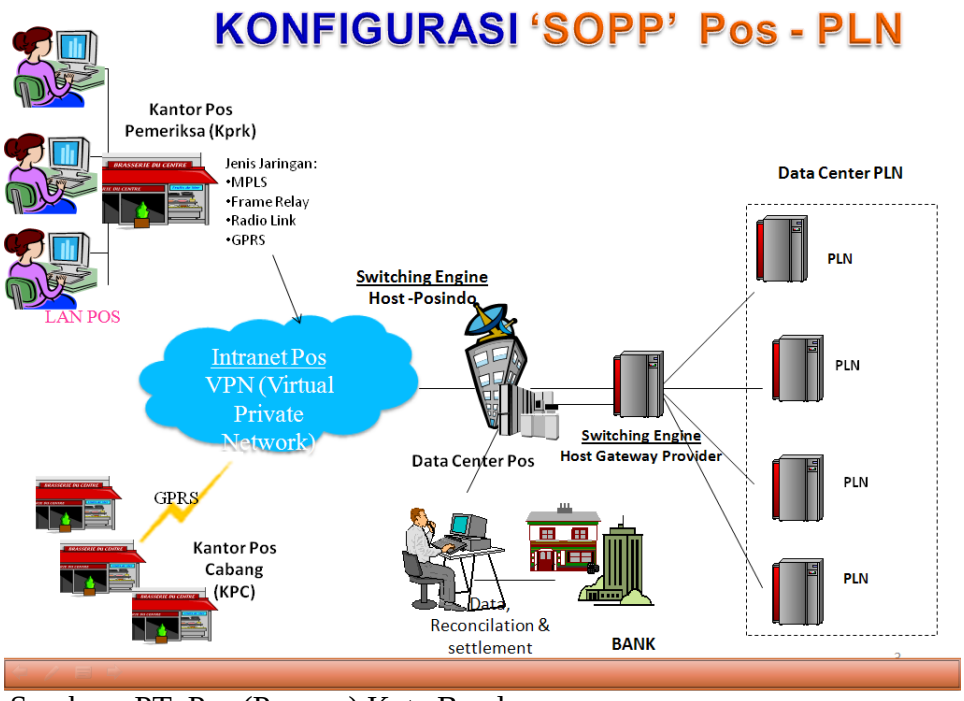
Gambar 3.5
Organisasi Layanan Keuangan (yankug) SOPP Sistem On-Line Payment Point



Sumber: PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Penjelasan organisasi layanan keuangan (yankug) dalam Helpdesk pengawasan kepada KPRK Bandung (kantor pemeriksa) untuk mengawasi kantor Pos Cabang dari Pos Cabang mulai Operasional ke Kprk kota Bandung untuk pelaporan layanan keuangan ke PRD (Pusat Rekonsilidasi Data) untuk PRD ke PLN ada Rekon dan Setlement menuju PLN atau dari PRD untuk melaporkan lagi ke Unit Bisnis Yankug (Pusat) dari Unit Bisnis Yankug masuk ke PLN.

Gambar 3.6
Konfigurasi SOPP Pos ke PLN



Sumber: PT. Pos (Persero) Kota Bandung

Kantor Pos cabang menginput data pelanggan yang akan melakukan pembayaran listrik secara *On-Line* kemudian kantor Pos pemeriksa melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut melalui jaringan

internet menggunakan VPN (Virtuan Pivate Network), adapun jenis jaringan yang digunakan adalah MPLS, FRAME RELAY, RADIO LINK, GPRS. Kemudian Data tersebut masuk ke data center Pos dan dilakukan reconcilation dan Settlement ke Bank. Lalu proses selanjutnya data tersebut dimasukan ke data center PLN melalui Host Gateway Provider.